

CATATAN AKHIR
RAPAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP)
BANDUNG, 13 DESEMBER 2017

1. Tingkat penyelesaian TLHP belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Penyelesaian TLHP Kemendagri tingkat penyelesaiannya 89% dan baru 15 Pemerintah Daerah yang tuntas menyelesaikan TLHP.
 - b. Penyelesaian TLHP K/L, dari 5 kementerian/Lembaga yang melakukan pembahasan, tingkat penyelesaiannya baru 23%.
 - c. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, masih diangka 19%.

Data di atas menunjukkan belum seluruh Pemerintah Daerah memiliki komitmen dan bersungguh-sungguh menyelesaikan rekomendasi yang telah diberikan.

2. Kemendagri mendorong penyelesaian TLHP agar paling lama 60 hari sejak laporan diterima sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) PP 12 tahun 2017.
3. Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk mencapai tingkat kapabilitas APIP dan SPIP Level III Tahun 2019.
4. Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung upaya penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah yang sedang dilakukan melalui revisi PP 18 Tahun 2016.
5. Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Provinsi akan melakukan pengawalan terhadap penganggaran Inspektorat kabupaten/kota dalam proses pembahasan Rancangan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018
6. Forum Inspektur Provinsi Seluruh Indonesia akan menyusun agenda kerja Tahun 2018-2019 bersinergi dengan Pemerintah dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP secara nasional.
7. Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memulai penggunaan pengawasan berbasis teknologi atau e-audit.

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI